



**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allat SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Dokumen Perubahan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 telah selesai disusun sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 tersebut, merupakan salah satu bagian dari dokumen rencana yang diwajibkan untuk disusun dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya, program –program yang dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan rincian kegiatannya secara spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan indicator kinerja dan pencapaian kinerja.

Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam perubahan Renja Tahun 2024 diharapkan dapat direalisasikan sehingga dapat dilihat hasil kegiatannya dalam mencapai Target yang di tetapkan pada perubahan RENSTRA 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat.

Simpang Empat, 2023
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Pasaman Barat



Imter Pedri, S.Pd.M.Si

Pembina Tk.1 IV/b

Nip. 19710704 199710 1 001

DAFTAR ISI

COVER

SK PENETEPAN

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN I

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-2

1.3 Maksud dan Tujuan I-3

1.4 Sistematika Penulisan I-4

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU I-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD II-16

2.3 Isi-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD II-20

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD II-21

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III-1

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA PD III-1

3.3 Program dan Kegiatan III-2

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-1

BAB V PENUTUP IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 T.C.29	II-3
Tabel 2.2 T.C.30	II-17
Tabel 2.4 T.C.31	II-22
Tabel 3.2 Tujuan dan sasaran Renja	III-2
Tabel 3.3 T.C.3.3	III-3
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan pendanaan perangkat Daerah	IV-2

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Perubahan Renja PD dengan berpedoman kepada Renstra PD dan RKPD.

Perubahan Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalkan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja PD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Perubahan Renja Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, untuk menjabarkan visi, misi dan program lembaga Diskominfo sesuai tugas dan fungsi lembaga, memberikan pedoman dalam pelaksanaan /operasional yang sudah tertuang dalam Rencana Strategis lima tahunan dan perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Tahunan Renja dan mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian.

Perubahan Renja Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

1.2. Landasan Hukum

Perubahan Renja Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan I tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
4. Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

- Pemerintah Daerah.
7. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
 8. Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
 9. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
 10. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
 11. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota.
 12. Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota.

1.3 Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Lampiran 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, maka sistematika penulisan Perubahan Renja SKPD adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

- 1.1 *Latar Belakang*, menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja PD, pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD. *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.
- 1.3 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya, capaian Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.
Analisis Kinerja Pelayanan PD, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Berisikan uraian mengenai :
 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat Daerah dan hal yang terkait dengan perangkat Daerah: Khusus Provinsi, Uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program

2.3

perangkat daerah kabupaten serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam pencapaian kinerja pembangunan;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional/ internasional, seperti: NSPK, SPM.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi PD. Tujuan dan sasaran Renja PD, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.*
- 3.2 *Program dan Kegiatan, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.*

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

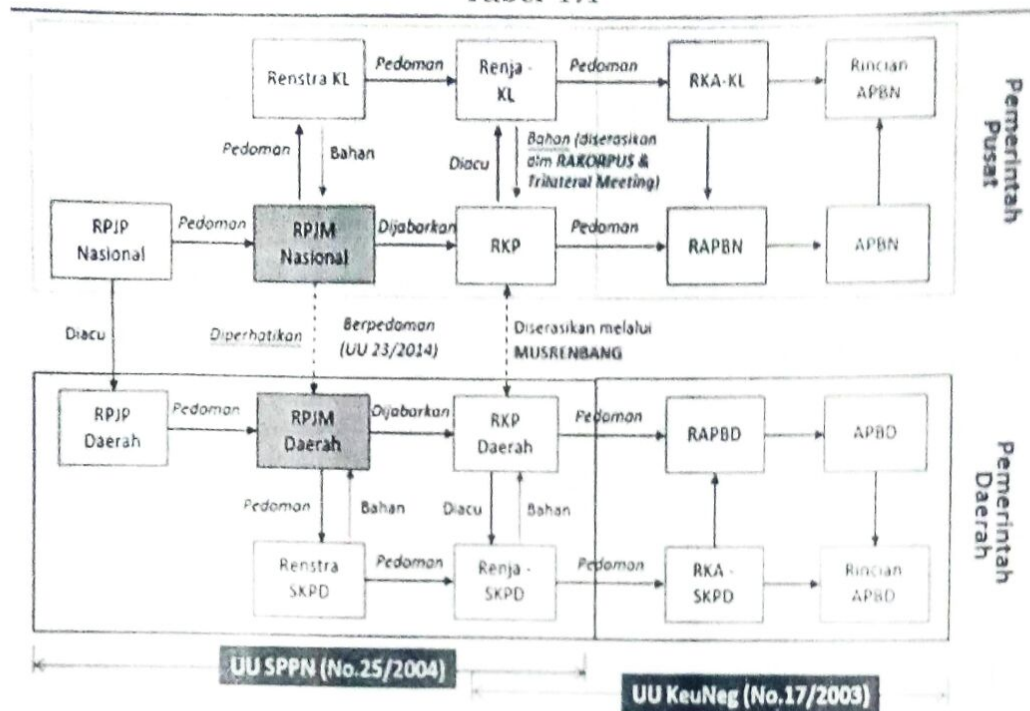
- 4.1 Rencana kerja diskominfo Kabupaten Pasaman Barat merupakan dokumen perencanaan program kegiatan tahun 2024 sebagai acuan bagi organisasi perangkat daerah dan masyarakat. Bagi satuan kerja pelaksana program RKPD tahun 2024 yang di tindak lanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam perencanaan maupun kerangka anggaran dalam APBD tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

1.5 Diagram/ Bagan Alir Keterkaitan Perencanaan

Tabel 1.1



BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Perangkat Daerah sampai Dengan Tahun 2023

Perubahan Renja PD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja PD yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra SKPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga untuk mengakomodir pelaksanaan tugas/urusan wajib tersebut Kabupaten Pasaman Barat melaksanakannya dengan penetapan Dinas Daerah yang melaksanakan tugas bidang Komunikasi dan Informatika. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian yang mulai secara teknis pada tanggal 1 Januari 2017. Sebelumnya sampai akhir Desember 2016 sebelumnya urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Bidang Komunikasi dan Informatika yang bergabung dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra Diskominfo tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengoptimalisasinya pengaplisasian program-program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pada Kominfo sendiri, dimana program-program tersebut menunjang keberhasilan atau kemajuan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Komunikasi, informatika dan bidang persandian.
- b. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, karena kurangnya anggaran yang dibutuhkan pada bidang - bidang Komunikasi dan Informatika.
- c. Terdapat beberapa Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
- d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD
- e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun realisasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (TA 2023) disajikan pada tabel 2.1 berikut:

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2023 KABUPATEN PASAMAN BARAT (I-C.29)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	URUSAN/Bidang Urusan pemerintah Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcomes)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program hasil Program dan keluaran kegiatan s/d kegiatan 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023)	Pencapaian Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat daerah s/d Tahun berjalan
					Target RENJA Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (9-7-9)
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								11-10-4
2 16 1	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	% terpublikasinya informasi pembangunan daerah pada PPID	100%	80%	80%	100%	124%	83%	245%

2	16	2	02.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah kegiatan Penilaian komisi informasi	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 %	1 kegiatan	3 kegiatan	3 %	
2	16	2	02.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah KIM yang dikembangkan dan diberdayakan	20 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	1 %	10 kelompok	30 kelompok	3 %	
2	16	2	02.01		Pengelola Media Komunikasi Publik/Pasbar	Jumlah diseminasi informasi Pemda melalui media cetak dan elektronik	1 kegiatan	-	1 kegiatan	2 %	1 kegiatan	3 kegiatan	3 %	
2	16	3			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo "	100 %	100%	100%		100%			
2	16	3	02.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaringan internet yang di pelihara	112 titik	74 titik	112 titik	0,6 %	112 titik	261 titik	2,3 %	
2	16	3	02.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	jaringan informasi yang terhubung	112 titik	31 OPD, 11 kecamatan, 14 puskesmas	112 titik	88 titik	0,7 %	112 titik	256 titik	2,2 %
2	16	3	02.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang dikelola dan dikembangkan	8 aplikasi	3 aplikasi	5 Aplikasi	1 %	5 Aplikasi	13 Aplikasi	1,6 %	

2	16	3	02.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pengelola pusat data	8 org	2 orang	5 org	8 org	1,6 %	5 org	15 org	1,8 %
2	16	3	02.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang di kembangkan	8 aplikasi	3 aplikasi	5 Aplikasi	5 aplikasi	1 %	5 Aplikasi	13 aplikasi	1,6 %
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI									
2	21	2			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks KAMI	3 Indeks	1 indeks	1 Indeks	1 indeks	1 %	2 indeks	4 indeks	1,3 %
2	21	2	02.01		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan aplikasi Umum Berbagi pakai	60%	100%	100%	50 %	0,5 %	60%	210 %	3,5 %
2	21	2	02.01	2	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah sistem keamanan informasi yang dapat yang dapat di tanggulang/ di pulihkan	6 sistem	2 sistem	3 Sistem	2 sistem	0,6 %	6 Sistem	10 sistem	1,6 %
2	21	2	02.01	3	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem elektronik yang telah memanfaatkan sertifikat elektronik	2 Aplikasi	1 aplikasi	1 Aplikasi	1 aplikasi	1 %	2 Aplikasi	4 aplikasi	2 %
2	21	2	02.02			Persentase Keterhubungan perangkat daerah dalam jaringan komunikasi sandi	99%	100%	80%	90 %	1,1 %	85%	275 %	2,7 %

2	21	2	02.02	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang melakukan BIMTEK jaring komunikasi sandi yang dilaksanakan oleh BSSN	3 orang	-	-	1 orang	-	3 org	-	-
2	20	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	OPD yang menggunakan Data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan Daerah								
2	20	02	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	% OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100 %	1,1 %	85%	100 %	90%	190 %	1,9 %
2	20	02	20	2	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase OPD yang menggunakan data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	32 OPD	-	-	32 OPD	-	32 OPD	-	-
2	20	02	20	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah rapat koordinasi Statistik Sektoral	7 Kali	-	0,7 %	4 kali	3 kali	7 Kali	10 kali	1,4 %
2	20	02	20	2	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik daerah yang terintegrasi	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	133 SDM Pengelola data	-	-	133 SDM Pengelola data	-	133 SDM Pengelola data	-	-
2	20	02	20	2	Membangun metadata statistik Sektoral	Penyusunan Metadata Kegiatan Statistik Sektora	133 buku	-	-	133 buku	-	133 buku	-	-

2002	20	2	02.01	Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Walidata Sektoral, Produsen Data Sektoral, dan Nagari Statistik	133 Nagari	-	133 Nagari	-	133 Nagari	-	-
------	----	---	-------	--	---	------------	---	------------	---	------------	---	---

Simpang Empat, 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika


Imter Pedji, S.Pd.M.Si
Nip. 19710704 199710 1 001

Berdasarkan tabel 2.1 TC.29

1. Kurangnya pengoptimalisasinya pengaplisasian program – program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pada Kominfo sendiri, dimana program program tersebut menunjang keberhasilan atau kemajuan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Komunikasi, informatika dan bidang persandian.
2. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, karena kurangnya anggaran yang dibutuhkan pada bidang – bidang Komunikasi dan Informatika.
3. Terdapat beberapa Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan berdasarkan indicator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat dalam mendukung pencapaian Misi Ke-5 dan Misi Ke-6 Pembangunan Daerah periode 2021-2026, Dibawah ini disajikan table analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format table T-C 30 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pasaman Barat (T- C.30)

No	Indikator Sarasan/IKU Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2021	2022	2023	2024	2024	2021	2022	2023	2024	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	B	-	B	B	
2.	Persentase Penurunan Temuan BPK dan / atau Inspektorat	75%	80%	85%	90%	-	-	-	85%	90%	
3.	Level Maturitas SPIP	1,98	2,11	2,35	2,48	1,98	3,370	2,35	2,48		
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	85%	86%	87%	-	-	-	86%	87%	
5.	Indeks Maturitas SPBE	1,98	2,11	2,25	2,35	2,18	2,36	2,25	2,35		
6.	persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

7.	% Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	5	10	10	25	5	6	10	25
8.	Cakupan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota	100	100	100	100	75	90	100	100
10.	Nilai capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral	-	2	2	2	-	2	2	2
11.	% OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	80%	85%	90%	95%	45%	47%	90%	95%
									Sebagian besar OPD (90%) menggunakan data statistik dari BPS dalam menyusun perencanaan kegiatan-kegiatannya

12.	Indek KAMI	Penilaian										Penilaian maks. dibutuhkan pada tahun 2022 dengan nilai 100
		1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	
13.	Cakupan Pemenuhan Asesmen Evaluasi Penerapan Keamanan Informasi Daerah	1 Area Penilaian	1 Area Penilaian	1 Area Penilaian	1 Area Penilaian	1 Area Penilaian	1 Area Penilaian	-	1 Area Penilaian	1 Area Penilaian	1 Area Penilaian	

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk menacapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin di capai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

- a. Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi pengembangan kelembagaan maupun sumberdaya melalui diklat teknis dan penjenjangan serta pendekatan yang terukur dan sitimatis terhadap OPD yang terkait.
- b. Fasilitas Komunikasi dan Informatika belum dapat menjangkau daerah kabupaten Pasaman barat, baik ditempat-tempat strategis terutama di Jorong/nagari terpencil.
- c. Sumber daya manusia yang mempunyai basic pengetahuan di bidang komunikasi dan informatika belum mencukupi.
- d. Kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang komunikasi belum membudaya sehingga masih harus selalu dikembangkan dan diawasi.
- e. Kurangnya sarana mobilitas aparat Dinas Komunikasi dan informatika.
- f. Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan yang masih terbatas, walaupun setiap tahun terjadi peningkatan kegiatan di Bidang Komunikasi dan Informatika.

- g. Masih terbatasnya sarana penunjang untuk mengerakkan kegiatan komunikasi dan informatika seperti penerangan keliling, pemutaran film, dan sosialisasi kebijakan pemda serta penyiaran radio.

Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain :

- a. Perbaikan berbagai sarana dan prasarana komunikasi dan media massa mulai dari pusat sampai ke daerah pedesaan sehingga akan mendukung pemerataan distribusi informasi ,
- b. Peningkatan peranan pos dan telekomunikasi serta media massa melalui pemberdayaan sehingga terjalinnya kerjasama dan keterpaduan langkah dalam penyediaan informasi,
- c. Pembentukan pusat-pusat informasi yang dibutuhkan masyarakat serta pemberdayaan kelompok informasi yang tumbuh dari bawah akan sangat membantu makin meratanya pemahaman dan wawasan masyarakat terhadap informasi pembangunan,
- d. Perbaikan sistem pengelolaan informasi pembangunan dan penyebarannya melalui pemberdayaan teknologi informasi sehingga terwujud pemerintahan yang berbasis informasi (e-government).

Diharapkan melalui strategi-strategi tersebut diatas Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat dapat mencapai tujuan Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2021-2026.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tahun 2023, jumlah Plafon Belanja Langsung Sementara yang dialokasikan untuk Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar Rp. **7.321.534.201,-** (Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Ratus Tiga puluh Empat ribu Dua Ratus Satu rupiah). Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan tahun 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1.	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	3.307.486.181	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2.499.793.848	
		Diskominfo	Persentase terpenuhinya belanja pegawai	49 orang	2.475.519.062		Diskominfo	Persentase terpenuhinya belanja pegawai	21 orang	2.228.035.958	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	27 org	34.350.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskominfo	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	25 orang	-	
	Administrasi umum Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi umum perangkat Daerah	100 persen	255.000.000	Administrasi umum Perangkat Daerah	Diskominfo	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi umum perangkat Daerah	100 persen	203.675.390	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Jumlah pengadaan barang milik daerah	8 unit	141.067.119	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Jumlah pengadaan barang milik daerah	6 unit	-	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara	51 Unit	124.700.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Pelihara	51 Unit	58.082.500
Penyediaan jasa pemerintahan daerah	Diskominfo	Terpenuhinya biaya rekening belanja pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100 %	2.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Terpenuhinya biaya rekening belanja pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100 %	-
2 Program Informasi dan Komunikasi Publik		% Publikasi informasi pembangunan Daerah pada PPID	100%	1.532.899.145	Program Informasi dan Komunikasi Publik		% Publikasi informasi pembangunan Daerah pada PPID	90%	1.004.824.050
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Kabupaten/ Kota	Diskominfo	Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintahan dan pemerintah kab/kota	100%	1.532.899.145	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Diskominfo	Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintahan dan pemerintah kab/kota	90%	1.004.824.050
3 Program Aplikasi Informatika		% organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	100%	1.940.281.960	Program Aplikasi Informatika		% organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	100%	1.584.009.950

	Pengelolaan Nama Domain yang Telah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfo	Jumlah jaringan internet yang dipelihara	112 Titik	1.640.281.960				Pengelolaan Nama Domain yang Telah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfo	Jumlah jaringan internet yang dipelihara	112 Titik	1.403.587.150
	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfo	Jumlah Aplikasi yang di Kelola dan di Kembangkan	7 Aplikasi	300.0000.000				Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Diskominfo	Jumlah Aplikasi yang di Kelola dan di Kembangkan	6 Aplikasi	181.008.800
4	Program Penyelenggaraan dan statistik		% OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	90%	417.992.256				Program Penyelenggaraan dan statistik		% OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	95%	16.699.450
	Penyelenggaraan statistik dan sektoral	Diskominfo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 dok	417.992.256				Penyelenggaraan statistik dan sektoral	Diskominfo	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 dok	16.699.450
5	Program Penyelenggaraan Persandian	Diskominfo	Indeks KAMI	3 indeks	122.874.659				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk	Diskominfo	Indeks KAMI	2 indeks	63.062.000

Untuk Pengamanan Informasi	Diskominfo	Persentase Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	1 kali	91.437.335	Pengamanan Informasi	Diskominfo	Persentase Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	1 kali	63.062.000
Penyelenggaraan n Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemrintah Daerah Kabupaten/ Kota	Diskominfo	Persentase Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	1 kali	91.437.335	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemrintah Daerah Kabupaten/ Kota	Diskominfo	Persentase Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	1 kali	63.062.000
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	pasbar	Persentase Keterhubungan Perangkat Daerah dalam Jaringan Komunikasi Sandi	75 %	31.437.324	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	pasbar	Persentase Keterhubungan Perangkat Daerah dalam Jaringan Komunikasi Sandi	55 %	-
Jumlah				7.321.534.201					5.168.985.298

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat mengalokasikan dana anggaran Tahun 2024 sebesar **Rp. 5.168.985.298,-** (Lima Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus sembilan Puluh Delapan Rupiah) dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sesuai Renstra Diskominfo dan RPJMD Periode 2021-2026. Dilihat dari RKPD awal terdapat pengurangan pada RKPD akhir dikarenakan adanya perubahan pengurangan defisit anggaran tahun 2024.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pembangunan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) merupakan sumber terbentuknya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya dapat menjadi sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) menentukan tingkat efektifitas dan efisiensi proses transformasi sumberdaya menjadi sumber daya baru yang lebih bernilai. Dengan demikian peningkatan kemampuan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sangat diperlukan untuk meningkatkan standar kehidupan bangsa dan negara, serta kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia di mata dunia.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi melalui Sistem Informasi sangatlah penting. Khususnya harus dapat menjalin proses Komunikasi yang harmonis dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaikbaiknya, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Garut berupaya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dengan seimbang melalui kegiatan dan tugas pokok dan fungsinya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2024, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DISKOMINFO yang dikaitkan dengan sasaran dan target kinerja Renstra DISKOMINFO, dalam rangka memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari misi yang telah dirumuskan sehingga dapat menggambarkan secara spesifik indikator kinerja keberhasilan, maka dari setiap misi ditetapkan tujuan dan sasaran Renja DISKOMINFO Tahun 2024.

Adapun tujuan dan sasaran dari ke-5 (lima) misi DISKOMINFO Kabupaten Pasaman Barat tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan Pembangunan yang Mengacu pada Misi
Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan
1	Mengembangkan kemampuan sumberdaya untuk melaksanakan tugas secara profesional dalam bidang komunikasi dan informatika	Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional
2	Menyediakan sarana dan prasarana telekomunikasi yang cukup serta mengintegrasikan seluruh potensi yang tersedia untuk mendukung pendapatan daerah	Mewujudkan fasilitas komunikasi yang berkualitas
3	meningkatkan kapasitas layanan informasi dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi	Mewujudkan masyarakat berbudaya informasi
4	Meningkatkan daya jangkau infrastruktur komunikasi dan informatika untuk memperoleh aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi	Meningkatkan komunikasi dan informatika semakin baik
5	Mendorong peningkatan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi telematika dalam rangka meningkatkan nilai tambahan layanan informasi	Meningkatkan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi telematika

Sumber : Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017

3.3 Program dan Kegiatan

Secara umum, rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Pasaman Barat Tahun 2024 tertuang dalam (Lima) program yang terdiri dari 12 (Dua Belas) kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut:

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Pencapaian Tahun 2024				Capaian		Pencapaian Misi Rencana Tahun 2024	
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan
2	16	01	2.02	Dinas Komunikasi dan Informatika							5.168.985.298,00		Target	Keluaran Sub Kegiatan
2	16	01	2.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.168.985.298,00		Target	Keluaran Sub Kegiatan
2	16	01	2.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							5.089.773.848,00		Target	Keluaran Sub Kegiatan
2	16	01	2.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2.499.793.848,00		Target	Keluaran Sub Kegiatan
2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2.228.035.958,00		Target	Keluaran Sub Kegiatan
2	16	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							2.008.136.958,00		Target	Keluaran Sub Kegiatan
2	16	01	2.02	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya belanjanya pegawai	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	21 Orang	49 orang		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang
2	16	01	2.02	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terpenuhinya belanjanya pegawai	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 orang	49 orang	130.999.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 orang
2	16	01	2.02	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya belanjanya pegawai	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	8 orang	49 orang	88.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 orang
2	16	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0,00			
2	16	01	2.05	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	52 orang	25 orang	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	52 orang
2	16	01	2.05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	25 orang	25 orang	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 orang
2	16	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							203.675.390,00			
2	16	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi umum perangkat Daerah	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 tahun	100 persen	1.557.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 tahun

2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan yang Disediakan Kantor yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi umum perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 tahun Paket	100 persen	2.370.340,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 tahun Paket	5.000.000,00
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi umum perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 tahun Paket	100 persen	154.687.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122 kali Laporan	150.000.000,00
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi umum perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 unit Unit	100 persen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit Unit	141.067.119,00
2	16	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi umum perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 unit Unit	100 persen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit Unit	35.000.000,00
2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi umum perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 item Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 item Unit	106.067.119,00
2	16	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi umum perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	6 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0,00
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi umum perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	100 %	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan yang Disediakan	100 %	2.000.000,00
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi umum perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	100 %	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan yang Disediakan	100 %	2.000.000,00
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi umum perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	100 %	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan yang Disediakan	100 %	2.000.000,00
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan, Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi umum perangkat Daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	100 %	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan yang Disediakan	100 %	2.000.000,00

2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100 Persen	8 unit Unit	51 unit	49.742.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 unit Unit	20.000,00
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	100 Persen	43 unit Unit	51 unit	14.340.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	43 unit Unit	20.000,00
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100 Persen	1 unit Unit	51 unit	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit Unit	30.000.000,00
2	16	02	2.01	0001	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	100 Persen	2 dok	100 persen	1.004.824.050,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	2 dok	1.537.899.245,00
2	16	02	2.01	0001	Penyediaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	90 %	2 dok	100 persen	1.004.824.050,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	2 dok	1.537.899.245,00
2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	90 %	12 kali Dokumen	100 persen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 kali Dokumen	20.000.000,00
2	16	02	2.01	0003	Monitoring Informasi dan Perencanaan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	90 %	12 kali Dokumen	100 persen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 kali Dokumen	20.000.000,00

[illegible]

2	16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	200 peserta Orang	100 persen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 peserta Orang	15.000.000,00	
2	16	02	2.01	0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 kegiatan Dokumen	100 persen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 kegiatan Dokumen	20.000.000,00	
2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	% publikasi informasi pembangunan daerah pada PPID	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	15 Klpk Dokumen	100 persen	169.673.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	15 Klpk Dokumen	128.020.000,00
2	16	03	2.01		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							1.584.675.950,00				1.940.281.940,00	
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							1.403.587.150,00				1.940.281.940,00	
2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah jaringan internet yang di pelihara	100 %	43/Instansi/Kantor Unit	112 titik	1.403.587.150,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	43/Instansi/Kantor Unit	1.940.281.940,00	
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah							181.018.800,00				300.000.000,00	

No		Kategori		Sub Kategori		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Sasaran		Tahun		Target		Realisasi	
16		03		2.02		0007		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		%		Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo "		Jumlah aplikasi yang dikelola dan dikembangkan	
														Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
														100 %	
														6 Aplikasi Unit	
														44.690.500,00	
														Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
														170.100	
														6 Agustus	
														Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	
														417.991	
														417.991	
														417.991	
														104.498.064,00	
														Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitas dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	
														104.498.064,00	
														Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	
														104.498.064,00	
														Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	
														122.874.654,00	
														122.874.654,00	
														93.417.351,00	
														104.498.064,00	
														Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	
														417.991	
														417.991	
														417.991	
														104.498.064,00	
														Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitas dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	
														104.498.064,00	
														Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	
														104.498.064,00	
														Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	
														122.874.654,00	
														122.874.654,00	
														93.417.351,00	
														104.498.064,00	
														Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	
														417.991	
														417.991	
														417.991	
														104.498.064,00	
														Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitas dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	
														104.498.064,00	
														Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	
														104.498.064,00	
														Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	
														122.874.654,00	
														122.874.654,00	
														93.417.351,00	
														104.498.064,00	
														Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	
														417.991	
														417.991	
														417.991	
														104.498.064,00	
														Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitas dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	
														104.498.064,00	
														Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	
														104.498.064,00	
														Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	
														122.874.654,00	
														122.874.654,00	
														93.417.351,00	
														104.498.064,00	
														Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	
														417.991	
														417.991	
														417.991	
														104.498.064,00	
														Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitas dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	
														104.498.064,00	
														Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	
														104.498.064,00	
														Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	
														122.874.654,00	
														122.874.654,00	
														93.417.351,00	
														104.498.064,00	
														Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	
														417.991	
														417.991	
														417.991	
														104.498.064,00	
														Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitas dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	
														104.498.064,00	
														Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	
														104.498.064,00	
														Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	
														122.874.654,00	
														122.874.654,00	
														93.417.351,00	
														104.498.064,00	
														Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	
														417.991	
														417.991	
														417.991	
														104.498.064,00	
														Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitas dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	
														104.498.064,00	
														Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	
														104.498.064,00	
														Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	
														122.874.654,00	
														122.874.654,00	
														93.417.351,00	
														104.498.064,00	
														Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	
														417.991	
														417.991	
														417.991	
														104.498.064,00	
														Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitas dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	
														104.498.064,00	
														Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	
														104.498.064,00	
														Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	
														122.874.654,00	
														122.874.654,00	
														93.417.351,00	
														104.498.064,00	
														Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	
														417.991	
														417.991	
														417.991	
														104.498.064,00	
														Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitas dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	
														104.498.064,00	
														Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	
														104.498.064,00	
														Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	
														122.874.654,00	
														122.874.654,00	
														93.417.351,00	
														104.498.064,00	
														Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	
														417.991	
														417.991	
														417.991	
														104.498.064,00	
														Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitas dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	
														104.498.064,00	
														Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	
														104.498.064,00	
														Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	
														122.874.654,00	
														122.874.654,00	
														93.417.351,00	
														104.498.064,00	
														Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	
														417.991	
														417.991	
														417.991	
														104.498.064,00	
														Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitas dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	
														104.498.064,00	
														Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	
														104.498.064,00	
														Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	
														122.874.654,00	
														122.874.654,00	
														93.417.351,00	
														104.498.064,00	
														Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	
														417.991	
														417.991	
														417.991	
														104.498.064,00	

[illegible]

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan akan merupakan dokumen perencanaan program kegiatan tahun 2024 sebagai acuan bagi OPD dan masyarakat. Bagi satuan kerja pelaksana program RKPD tahun 2024 yang ditindak Lanjut dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 dan kebijakan umum APBD, prioritas dan Plafon anggaran sementara APBD Tahun 2024 masih dalam tahap perencanaan. Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien, untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan menerapkan prinsip - prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program - program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya kegiatan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program kegiatan, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan program kegiatan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan program kegiatan tahap berikutnya. Rencana kerja dan pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut

[illegible]

2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Penggantian Kantor	Jumlah Belanja Dibayar dan Penggantian Kantor yang Diserahkan	1 Pa kel	1 tahun Pukul	45.000.550,00	Kat. Prasarana Baru: Semua Kebutuhan: Semua Kebutuhan: Alokasi Umum	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengajukan permohonan penggantian peralatan yang rusak atau habis pakai yang akan digunakan untuk kegiatan pelayanan publik	Mengajukan permohonan penggantian peralatan yang rusak atau habis pakai yang akan digunakan untuk kegiatan pelayanan publik	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tinggal	Jumlah Belanja Peralatan Rumah Tinggal yang Diserahkan	1 Pa kel	1 tahun Pukul	2.370.340,00	Kat. Prasarana Baru: Semua Kebutuhan: Semua Kebutuhan: Alokasi Umum	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengajukan permohonan penggantian peralatan yang rusak atau habis pakai yang akan digunakan untuk kegiatan pelayanan publik	Mengajukan permohonan penggantian peralatan yang rusak atau habis pakai yang akan digunakan untuk kegiatan pelayanan publik	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.18.01.2.06.0006	Pengelolaan Rasio Koordinasi dan Komunitas SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Komunitas SKPD	126 Laporan	122 kali Laporan	154.000.000,00	Kat. Prasarana Baru: Semua Kebutuhan: Semua Kebutuhan: Alokasi Umum	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengajukan permohonan penggantian peralatan yang rusak atau habis pakai yang akan digunakan untuk kegiatan pelayanan publik	Mengajukan permohonan penggantian peralatan yang rusak atau habis pakai yang akan digunakan untuk kegiatan pelayanan publik	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah yang Utang Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah yang Utang Pemerintah Daerah	8 Unit	6 Unit	0,00			Mengajukan permohonan penggantian peralatan yang rusak atau habis pakai yang akan digunakan untuk kegiatan pelayanan publik	Mengajukan permohonan penggantian peralatan yang rusak atau habis pakai yang akan digunakan untuk kegiatan pelayanan publik	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB V

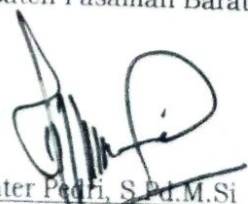
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2024. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intense antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat sebagai OPD yang bertanggung jawab memberikan keyakinan yang memadai.

Atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, perlu merumuskan program/kegiatan ke depan, maka tindak lanjut (*follow up*) menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi. Tentu saja, Perubahan Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencanaan yang terintegrasi.

Pasaman Barat, 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pasaman Barat



Imter Padli, S.Pd.M.Si
Pembina Tk.1 IV/b
NIP. 19710704 199710 1 001